

## A. Buku

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005).

Alex Nitisemito, (2013), *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 32.

Arya Maheka , *Memerangi & Memberantas Korupsi* (Jakarta : KPK).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana: Masalah-Masalah Hukum*, Edisi I, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1998).

Bangga Andika Hutabarat, *Kedudukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Ditinjau Dari Sistem Pengawasan*.

Baharuddin Lopa, “*Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*”, dan Djoko Prakoso, “*peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*”.

Bachtiar Effendi, (2002), *Hal Utama Dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Andi Offset.

Christopher Krzysztof Lazarski, 2012, *Power Tends to Corrupt: Lord Acton’s Study of Liberty*, Northern Illinois University.

Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Prenadamedia Group, Jakarta.

G.P. Hoefinagels, *The Other Side of Criminology*, (Holland: Kluwer Deventer, 1969)

Ilham Gunawan, Sejarah Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Di Indonesia, dalam Media Hukum, Edisi Ulang Tahun 22 Juni 2003, (Jakarta: PT. Media Indra Buana, 2003).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2003, Balai Pustaka.

Marwan Effendy, 2013, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, REFERENSI (GP Press Group), Ciputat.

Muladi, 1993, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan White Collar Crime*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

*Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

M. Dawam Raharjo, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosio Kultural*, 1999, dalam Edy S. Hamid (ed), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, (Los Angeles: University of California Press, 1988).

R. L. Akers & R. L. Matsueda, *Donald R. Cressey: An Intellectual Potrait of A Criminologist*?. (Sociological Inquiry, 1989)

R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Riyadi dan Dedi Supriadi Bratakusumah, (2004), *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi*.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981).

Sukarna, (1990), *Prinsip-Prinsip Administrasi*, Bandung: Mandar Maju, hlm 113.

Syed Hussein Alatas, 1990, *Corruption: Its Nature, Causes, and Function*, UK.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983).

Transparency International, 2019, *Inisiatif Penguatan Lembaga Antikorupsi Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019*, Transparency International, Jakarta.

Tim National Risk Assessment Indonesia, 2015, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*, PPATK, Jakarta.

Theodore M. Smith, *Corruption Tradition and Change in Indonesia*, (Cornell University, 1971, Vol. 11).

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Bandung : citra umbara 2016, hal. 19.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantungkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

### C. Jurnal, Karya Ilmiah dan Internet

CNN Indonesia, 2020, *184 Anggota DPRD Korupsi, KPK Ingatkan Kepercayaan Rakyat*, Jakarta.

Devina Halim, *Resmi Dibubarkan, Ini Perjalanan TP4 Warisan Eks Jaksa Agung Prasetyo*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/05/10200561/resmi-dibubarkan-ini-perjalanan-tp4-warisan-eks-jaksa-agung-prasetyo?page=all> diakses pada 29 Juni 2020.

Eddy Rifai, *Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Disertasi Universitas Indonesia, 2002)

Eko Daniarto, 2017, *Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Negeri Kota Magelang dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

H.R. Sadili Sastrawijaya, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985*, dalam Mohammad Anggidigdo, *Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, (Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 2004).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/korupsi>, Diakses pada 28 Juni 2020.

Encyclopedia Americana, *Americana Corporation*, Volume 8.

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1). Diakses pada 25 Juni 2020.

Kejaksaan Republik Indonesia. <https://www.kejaksaan.go.id/>. Diakses pada tanggal 7 November 2019.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, <https://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian> Diakses pada 25 Juni 2020.

Kejaksaan Republik Indonesia, [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3) diakses pada 26 Juni 2020.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, (2015), *Paparan Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)*.

Lina Herlina, *Pemerintah Daerah Terbantu Keberadaan TP4D*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/258125-pemerintah-daerah-terbantu-keberadaan-tp4d> diakses pada 29 Juni 2020.

Mardjono Reksodiputro, 2007, dalam Salahuddin Luthfie, *Kewenangan Kejaksaan Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Tesis Univeristas Indonesia, 2011)

Marissa Amalina Shari Harahap, 2012, *Analisis Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber*, Tesis, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok.

Mohammad Anggidigdo, *Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, (Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 2004).

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Berita KPK* <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi-mencegah-korupsi> diakses pada 29 Juni 2020.

Korupsi, n.d). <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi> diakses pada 29 Juni 2020.

Reja Hidayat, *Pembubaran TP4 Kejaksaan: Menolak Evaluasi, Menutup Kasus Lama*, <https://tirto.id/pembubaran-tp4-kejaksaan-menolak-evaluasi-menutup-kasus-lama-enzG>

Diakses pada 25 Juni 2020.

Reyhes, TP4D Dicabut, *Kejaksaan Tanggamus Masih Tetap Dampingi Pelaksanaan APBD 2020*, <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/tp4d-dicabut-kejari-tanggamus-masih-tetap-dampingi-pelaksanaan-apbd-2020/> diakses 29 Juni 2020.

Sumbar Fokus, *Selama 2019, TP4D Kejari Padang Dampingi 26 Proyek Senilai Rp90 Miliar* <https://www.sumbarfokus.com/berita-selama-2019-tp4d-kejari-padang-dampingi-26-proyek-senilai-rp90-miliar.html> diakses pada 29 Juni 2020.

Salahuddin Luthfie, *Kewenangan Kejaksaan Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Tesis Univeristas Indonesia, 2011).

Suriyani, *Indenpendensi Kejaksaan Di Indonesia Serta Perbandingannya Dengan Kejaksaan Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 2004).

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P), (n.d), *Paparan Peran Serta Dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional*.

#### **D. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Sonora Gokma, Anggota Tim TP4D Kejari Karawang, tanggal 10 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan Ganda Simanjuntak, Kepala Sub Tim TP4D Kejari Karawang, tanggal 10 Juli 2020.